

PKS: Cawapres yang Anies Pilih Antara AHY, Khofifah, dan Aher

JAKARTA (IM) - Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Iqbal mengatakan, Anies Baswedan telah mengantongi satu nama bakal calon wakil presiden (cawapres) di antara tiga nama yang disebut-sebut akan mendampingi di Pilpres 2024.

Selama ini ada tiga nama bakal cawapres Anies yang beredar di publik, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan eks Gubernur Jawa Barat Agus Heryawan (Aher).

"(Cawapres Anies) di antara tiga nama dan dari partai pengusung," ujar Iqbal saat dimintai konfirmasi, Minggu (4/6).

Di antara ketiga nama tersebut, hanya Khofifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sebagai informasi, KPP terdiri dari Demokrat, Nasdem, dan PKS. Iqbal memastikan nama Khofifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies. Sebab, Khofifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem.

"Khofifah masih masuk, usulan Nasdem," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra enggan

membocorkan siapa nama cawapres Anies. Dia hanya mengatakan pasangan yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung nantinya pasti menjadi pasangan terbaik.

"Ini pasangan terbaik. Sesuai harapan rakyat," ucap Herzaky dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun, ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya itu.

"Masih panjang, masih panjang, pokoknya sudah ada. Tapi, nanti pada waktunya diumumkan," ujar Anies di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6).

Anies bakal melanjutkan komunikasi ke tiga ketua umum partai politik (parpol) anggota KPP. Anies diketahui telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6). Kemudian juga bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Nanti kita akan ketemu (pimpinan PKS) lagi dalam waktu dekat ini," ucap Anies. ● mei

Pemerintah Didesak Segera Bentuk Pansel Capim KPK

JAKARTA (IM) - Mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan, mendesak pemerintah segera membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK, meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perpanjangan masa jabatan Firdi Bahuri dkk satu tahun ke depan.

Mantan Kepala Satgas Pembelajaran Antikorupsi KPK ini awalnya menyebut soal rencana pemerintah yang akan membentuk pansel capim KPK pada Juni 2023. Namun rencana itu dinilai melandai setelah MK memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

Hotman lalu mengungkit putusan MK yang mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Secara khusus, dia menyoroti putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan Dewas KPK.

Dalam Pasal 37A ayat 3 UU 19 tahun 2019 tentang KPK diatur soal masa jabatan Dewas KPK adalah empat tahun. Pemilihan Dewas KPK pun harus melalui panitia seleksi sesuai dalam Pasal 37E ayat 2 UU KPK.

Hotman mengatakan putusan MK terhadap gugatan Nurul Ghufron soal perpanjangan masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK tidak

merevisi pasal di UU KPK terkait jabatan Dewas.

Dalam pertimbangan putusan MK memang telah disinggung soal perpanjangan masa jabatan Dewas KPK menjadi lima tahun. Namun, Hotman menilai pertimbangan putusan MK tidak bisa serta merta merubah pasal dalam Undang-Undang.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) JUGA mendesak pemerintah segera membentuk Pansel Capim KPK.

"Saya tetap pada posisi perpanjangan oleh MK jadi 5 tahun itu berlaku untuk periode yang akan datang. Artinya untuk periode yang sekarang itu adalah masa jabatan 4 tahun. Jadi presiden dan pemerintah harus segera membentuk pansel sebagai bentuk personifikasi putusan itu berlaku tahun berikutnya," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Sabtu (3/6).

"Jadi ini berlaku 4 tahun jadi harus membentuk panitia seleksi untuk pengantinya," katanya.

Boyamin juga mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang telah meminta MK menafsirkan putusannya itu. Tetapi, menurutnya, pansel capim KPK harus segera dibentuk. ● han

Sidang Perdana Mario Dandy Digelar di PN Jaksel Besok

JAKARTA (IM) - Mario Dandy Satrio, tersangka penganiayaan terhadap David Ozora (17), dan Shane Lukas akan menjalani sidang perdana pada Selasa (6/6).

Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, menyebutkan, tidak ada pengamanan khusus pada sidang tersebut.

"Pengamanan seperti biasa," kata Djuyamto saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (3/6).

Djuyamto menyebutkan terkait teknis pengamanan pada sidang tersebut menjadi kewenangan pihak Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel).

"Mengetahui teknisnya menjadi kewenangan Polres Jaksel koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan pengamanan internal PN Jaksel," katanya.

Sebagaimana diketahui, Mario Dandy Satrio dan Shane Lukas tersangka kasus penganiayaan terhadap

David Ozora telah resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) pada Jumat (26/5) lalu.

Adapun sidang perdana perkara tersebut akan digelar pada Selasa 6 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dipimpin oleh Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono.

Sebelumnya, sempat beredar isu perlakuan istimewa terhadap Mario Dandy Satrio di Rutan Cipinang. Isu tersebut pertama kali dimunculkan oleh pemilik akun Twitter @logikapolitikid. Pemilik akun tersebut menyebut bahwa Mario Dandy langsung dimasukkan ke blok khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tanpa melalui blok penampungan.

Namun hal ini sudah dibantah pihak Ditjenpas yang menyebut bahwa penempatan Mario Dandy di Rutan Cipinang sudah sesuai prosedur. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KONSOLIDASI AKBAR PEMENANGAN PDI PERJUANGAN

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan pidato saat menghadiri konsolidasi kemenangan akbar PDI Perjuangan se-Jakarta di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (4/6). DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menggelar konsolidasi akbar untuk kemenangan dalam Pileg dan Pilpres 2024.

Denny Indrayana sebut Ketua DPD juga Dapat Informasi MK Bakal Putuskan Sistem Tertutup

Denny menyebut jika ada perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup, bisa berdampak Pemilu 2024 ditunda.

JAKARTA (IM) - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku bukan hanya dirinya yang mendapatkan informasi tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan sistem pemilihan legislatif menjadi proporsional tertutup.

Menurutnya, sebelum hal itu diungkapkannya ke publik, Ketua DPD La Nyalla Matallitti sudah menyatakan soal rumor itu kepadanya.

"Bahkan, beberapa saat yang lalu, sebelum saya mendapatkan informasi yang saya tweet ini. Informasi yang relatif kurang lebih sama datang dari Ketua DPD, Ketua Dewan

Perwakilan Daerah, Bapak La Nyalla," kata Denny dalam suatu acara, yang dikutip pada Minggu (4/6) di YouTube.

"Dia mengatakan, 'Mas Denny, ini MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup'. Nah, waktu itu Pak La Nyalla juga punya informasi, cuma saya tidak tweet. Gitu lho," katanya.

Selain itu, Denny mengungkapkan bahwa La Nyalla juga memperkirakan perubahan sistem pemilu tersebut akan berdampak pada pelaksanaan pemilu yang bisa tertunda. Pelaksanaan pemilu bisa tertunda semisal tiga bulan dari yang direncanakan

sebelumnya, Februari 2024.

"Jadi beliau mengatakan ini MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan karenanya nanti pemilunya ditunda tiga bulan sekian lama supaya KPU-nya punya waktu persiapan akibat perubahan gitu," jelas Denny.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini tak memungkiri bahwa pemilu memang bisa saja ditunda. Tak hanya pemilu yang ditunda, dia juga memperkirakan bisa saja isu perpanjangan masa jabatan presiden terealisasi.

Namun Denny tak menjabarkan lebih detail terkait argumentasinya soal perpanjangan masa jabatan presiden ini. Ia kemudian menyatakan bahwa rumor yang disampaiannya ini dapat berimplikasi pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota DPR yang tak setuju sistem pemilu diubah,

mengancam bakal melakukan boikot terhadap putusan MK.

"Nah kalau anggota dewannya boikot, pemilunya kan ditunda. Apakah ini yang dimaksud diharapkan sebenarnya, jadi kan tidak bagus juga kalau kemudian ini menjadi pintu membuka ruang bagi penundaan pemilu. Mestinya penundaan pemilu kita tutup," tegas Denny.

Oleh sebab itu, Denny berharap apa yang disampaiannya kepada publik terkait rumor putusan MK dapat menjadi perhatian. Terutama, jelas Denny, kepada MK yang akan memutuskan sistem pe-

milu dalam waktu dekat agar lebih hati-hati sebelum bertindak. "Harapan saya tidak ada penundaan pemilu tapi kalau kemudian saling ngotot yang satu enggak mau diubah menjadi tertutup, yang satu ngotot supaya diubah menjadi tertutup," ujarnya.

"Kemudian antara kekuatan-kekuatan politik tidak ada titik temu, dan itu menyebabkan saling boikot dan saling kunci, ya bisa terbuka kemungkinan situasi politik memanas dan itu yang tidak kita harapkan pemilunya ditunda," kata Denny menandatangani. ● han

Soal Calon Presiden dari Golkar, Airlangga: Tunggu 1-2 Bulan Lagi

JAKARTA (IM) - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan soal calon presiden (capres) yang akan diusung Partai Golkar akan diputuskan dalam waktu dekat. Saat ini, Golkar masih terbuka dengan berbagai opsi capres yang telah bermunculan di publik.

Peryataan ini disampaikan Airlangga saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (4/6).

"Opsinya masih terbuka, mudah-mudahan keputusan tidak lama lagi. Jadi untuk teman-teman wartawan, masih tunggu satu-dua bulan lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, Partai Golkar terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik guna menghadapi Pilpres 2024.

Informasinya, Golkar saat ini tengah menjajaki pembentukan koalisi besar dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra. Namun pada saat yang sama, Golkar juga telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keberadaan koalisi ini tengah goyah, setelah PPP memutuskan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama PDI Perjuangan.

Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, Airlangga juga pernah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai

Nasdem Surya Paloh. Nasdem sendiri diketahui telah membentuk koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Airlangga, langkah Golkar mempertimbangkan soal sosok yang akan diusung pada Pilpres 2024, sudah dilakukan sejak 2022 lalu.

"Oleh karena itu, dengan Rakernas ini, saya berharap bahwa kebijakan di berbagai tingkatan pengurus provinsi, kabupaten/kota, tingkat fraksi, tingkat organisasi hasta karya, dan di seluruh jajaran Partai Golkar agar terus bergerak untuk kemenangan Partai Golkar," katanya.

Untuk diketahui bahwa hingga kini, Golkar belum memutuskan siapa kandidat capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Di dalam penajakan pembentukan koalisi besar, Golkar ingin memisahkan Airlangga sebagai cawapres Prabowo Subianto. Namun, keinginan itu selalu ditolak oleh PKB, yang sejak awal telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Gerindra.

Sementara, belakangan juga sempat muncul opsi untuk memisahkan Airlangga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Wacana itu muncul di internal PAN yang juga diamini oleh Golkar. Akan tetapi gabungan perolehan suara kedua partai itu belum cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. ● mei

Sekjen PDI-P Sebut Ada Parpol Lain Umumkan Dukungan ke Ganjar, Jumat

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebut bakal ada partai politik lain yang akan memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Seperti diketahui, sejauh ini, Gubernur Jawa Tengah itu telah mengantongi dukungan dari PDI Perjuangan, Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Hasto, partai politik tersebut akan mengumumkan dukungan terhadap Ganjar pada pada Jumat mendatang.

"Pak Ganjar ini kan baru jadi calon presiden dari PDI Perjuangan, dari Partai Persatuan Pembangunan dari Hanura, dan kemu-

dian kemarin kita sudah membangun kesepahaman dengan Partai Amanat Nasional, maka Jumat minggu depan akan ada partai lain yang akan bergabung memenangkan kita saudara-saudara sekalian," kata Hasto dalam acara konsolidasi PDI-P DKI Jakarta di Basket Hall Senayan, Jakarta, Minggu (4/6).

Kendati begitu, Hasto tak menyebut siapa partai politik yang dimaksud. Ia juga tak menyebut apakah partai yang dimaksud adalah PAN usai partai pimpinan Zulkifli Hasan itu menemui PDI-P pada Jumat (2/6) kemarin.

Hasto menegaskan bahwa komunikasi juga terus dilakukan PDI-P dengan generasi muda. Sebab generasi muda ini adalah masa depan Indonesia.

"Karena itulah apa yang menjadi perhatian dari Presiden Jokowi, perlunya loncatan kemajuan sehingga Presiden Jokowi pun akan mencari demi menjaga loncatan kemajuan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Hasto sempat menyampaikan pantun di depan ribuan kader PDI-P.

"Pemimpin itu tiada hanya sekedar berjanji. Harus kaya prestasi. Tampilkan narasi kemajuan untuk negeri," ucap Hasto.

"Presiden Jokowi dan Ganjar itu sehat. Kesatu-paduan keduanya bikin bakal calon lain iri," imbuhnya melanjutkan pantunya. ● han

FOTO: ANTARA



RAPAT KERJA NASIONAL PARTAI GOLKAR

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2023 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6). Rapat yang dihadiri pengurus DPD dari seluruh Indonesia tersebut mengangkat tema Bersama Menangkan Hati Rakyat Majukan Indonesia.

mandiri PENGUMUMAN

Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan Atau Cessie fasilitas kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada Tanggal 31 Mei 2023 dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama Debitur Hizman.
2. Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp.297.386.991,07
3. Cessionaris a.n Sdr. Hedy Sifran, beralamat di Citra Garden 3 Blok B-6 No. 37 RT 009 RW 013 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt 31 Mei 2023 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama Hizman telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Jakarta 2